

REVITALISASI NILAI-BUDAYA DAN UNGKAPAN TRADISIONAL JAWA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN

Kodiran*)

Pada hakikatnya di dalam program pembangunan terdapat dua macam konsep, yaitu pembangunan menurut "konsep Barat" dan pembangunan menurut "konsep Timur". Keduanya satu sama lain berbeda baik ciri-cirinya maupun tujuannya. Adapun program pembangunan yang dilaksanakan dengan dasar "konsep Barat" itu ditandai oleh (1) penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksinya, (2) dilakukan secara kompetitif, dan (3) hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, sedangkan tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan dari individu-individu serta kelompok-kelompok sosial tertentu. Sementara itu, program pembangunan yang diselenggarakan dengan landasan pembangunan "konsep Timur" dilakukan memakai berbagai jenis teknologi yang dijalankan secara kooperatif dan hasilnya dimanfaatkan bagi kepentingan umum, serta tujuannya untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan penghasilan segenap warga masyarakat.

Sejalan dengan konsep pembangunan yang kedua di atas, maka semua program pembangunan di Indonesia pada prinsipnya dimaksudkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan perumusan Undang-Undang No. 16 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Kesejahteraan

sosial yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjun-

*) Prof. Dr. Kodiran, Guru Besar FIB UGM Yogyakarta.

jung tinggi hak-hak asasi serta berkewajiban manusia sesuai dengan Pancasila (Salim 1991: 89).

Adapun pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan sosial itu akan berhasil jika tingkat pendapatan dari kelompok penduduk yang menikmati tingkat pendapatan relatif tinggi dirangsang untuk berpartisipasi secara aktif dalam memobilisasi dana sosial sebagai pelengkap dari sistem perpajakan negara.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan dari berbagai agama guna mengalihkan sebagian dari hasil kekayaan bagi mereka yang tidak mampu, perlu dimobilisasi sebagai sumber pembiayaan yang efektif bagi program peningkatan kesejahteraan sosial.

Sejajar dengan hal itu semua, pendidikan dan penerangan yang sistematis untuk menumbuhkan solidaritas sosial perlu dikhiatkan, sehingga menghasilkan gerakan sukarela mengumpulkan dan oleh masyarakat sendiri bagi pengembangan kesejahteraan umum.

Maka dari itu, seiring dengan semua upaya tersebut di atas, harus pula ditumbuh kembangkan sistem nilai-budaya yang tidak membenarkan pameran kekayaan yang bersifat konsumtif serta pola konsumsi dari golongan yang berpenghasilan tinggi perlu dikendalikan, sehingga ter-

buka sumber dana guna dialihkan ke arah pengembangan sosial. Selain itu, langkah-langkah yang menumbuhkan prestise penyumbang dapat diusahakan sebagai imbalan.

Demikian pada dasarnya dibutuhkan kelompok penduduk yang relatif mampu untuk dibina dan digalakkan sistem nilai-budaya dan solidaritas sosialnya sebagai pendukung pengembangan kesejahteraan sosial agar supaya kelompok masyarakat yang kurang mampu dapat hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat.

Revitalisasi Nilai-Budaya dan Ungkapan Tradisional Jawa dalam Pembangunan

Sebelum diulas tentang arti pentingnya aktualisasi sistem nilai-budaya dan ungkapan tradisional suku bangsa Jawa, terlebih dahulu diuraikan (1) konsep sistem nilai-budaya, (2) daerah budaya Jawa dan (3) sifat budaya jawa. Ketiganya masing-masing sebagai eksplanasi defnisi, identifikasi variasi budaya serta introduksi karakteristik budaya Jawa.

1. Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagi-

an besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa saja yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga tentang segala sesuatu yang dianggap remeh serta tidak berharga dalam hidup. Dengan demikian sistem nilai-budaya berfungsi sebagai suatu pedoman dan sebagai suatu sistem tata kelakuan yang tertinggi dari yang lain, seperti hukum, hukum adat, aturan sopan santun dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal itu pada umumnya suatu sistem nilai-budaya yang tertentu sudah sejak lama berkembang dan telah mencapai kemantapan yang secara langsung hidup dari generasi ke generasi. Dalam pada itu, fungsinya sebagai pedoman tingkah laku serta tata kelakuan, suatu sistem nilai-budaya bersifat superorganik, yaitu seolah-olah berada di luar dan di atas diri para individu dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Biasanya para individu tersebut sudah sejak kecil telah diresapi dengan nilai-budaya dari masyarakatnya, sehingga konsepsi-konsepsi itu sangat sulit diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat.

Adapun suatu sistem nilai-budaya meskipun merupakan konsepsi-konsepsi abstrak juga dapat mempengaruhi tindakan

manusia secara langsung. Selain itu, suatu nilai-budaya mungkin juga dapat menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir tertentu pada individu yang bersangkutan.

2. Daerah Budaya Jawa

Menurut pandangan orang Jawa, kebudayaannya tidak merupakan suatu kesatuan yang homogen. Mereka sadar akan adanya suatu keaneka-ragaman yang sifatnya regional, sepanjang daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keaneka-ragaman kebudayaan Jawa ini sedikit-banyak cocok dengan daerah-daerah logat bahasa Jawa, dan tampak juga dalam unsur-unsur seperti makanan, upacara-upacara rumah-tangga, kesenian rakyat, dan seni suara.

Orang Jawa terutama memiliki pandangan yang sudah pasti mengenai kebudayaan Banyuwangi yang daerahnya meliputi bagian barat daerah kebudayaan Jawa. Lebih khusus bagian tenggaranya dan daerah Bagelan dapat dipandang sebagai dua subdaerah kebudayaan. Kecuali logat Banyuwangi yang sangat berbeda, juga masih ada sisa-sisa dari bentuk-bentuk organisasi sosial kuno, seperti perserikatan *mancapat* yang terdiri dari lima desa tetangga, upacara-upacara sepanjang lingkaran hidup yang bersifat khas, suatu folklor yang

khlas, dan bentuk-bentuk kesenian daerah yang khas pula, terutama yang menunjukkan sifat-sifat khususnya.

Kebudayaan Jawa yang hidup di kota-kota Yogyakarta dan Surakarta merupakan peradaban orang Jawa yang berakar di Kraton. Peradaban ini mempunyai suatu sejarah kesusasteraan yang telah ada sejak empat abad yang lalu, dan memiliki kesenian yang maju berupa tari-tarian dan seni suara kraton, serta yang ditandai oleh suatu kehidupan keagamaan yang sangat sinkretistik campuran dari unsur-unsur agama Hindu, Budha, dan Islam. Hal ini terutama terjadi di Kraton Yogyakarta, Surakarta di mana berkembang berpuluh-puluh gerakan keagamaan yang kontemporer, yang disebut gerakan kebatinan. Daerah istana-istana Jawa ini sering disebut *Negarigung*.

Orang Jawa yang menganggap berbeda, suatu kebudayaan yang terdapat di kota-kota pantai utara Pulau Jawa yang disebut kebudayaan *Pesisir*. Kebudayaan ini meliputi daerah dari Indramayu-Cirebon di sebelah barat, sampai ke kota Gresik di sebelah timur. Penduduk daerah Pesisir ini pada umumnya memeluk agama Islam puritan yang juga mempengaruhi kehidupan sosial-budaya mereka. Sejarah kesusasteraan mereka yang su-

dah berumur empat abad juga menunjukkan suatu pengaruh agama Islam yang kuat. Orang Jawa sendiri hanya membedakan antara suatu sub-daerah Barat yang pusatnya di Cirebon, dan suatu sub-daerah Timur yang berpusat di Demak. Kebudayaan Jawa yang hidup di Surabaya dan sekitarnya dengan logat Surabaya yang khas itu, oleh orang Jawa sendiri biasanya dianggap sebagai suatu sub-daerah kebudayaan yang khusus.

Kebudayaan Jawa yang ada di daerah yang meliputi Madiun, Kediri dan daerah delta Sungai Brantas sebenarnya sama dengan kebudayaan Jawa Tengah di Yogyakarta dan Surakarta, begitu pula para pegawai pemerintahan daerah itu biasanya memilih gaya hidup dan meniru gaya hidup bangsawan-bangsawan di Yogyakarta dan Surakarta. Seperti halnya di Surakarta, maka di Madiun dan Kediri gerakan kebatinan dan gerakan religio-magi banyak berkembang. Kebudayaan rakyat dan kesenian rakyat di daerah itu sangat mirip dengan yang ada di Yogyakarta dan Surakarta, walaupun di Ponorogo di daerah Madiun, terdapat tarian rakyat bernama *warok* yang sangat khas karena bersifat magi. Orang Jawa menyebut daerah Madiun Kediri dan daerah Delta Sungai

Brantas itu *Daerah Mancanegari*, yang berarti "Daerah Luar", karena merupakan daerah pinggir-giran dari kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Jawa Mataram dalam abad ke-17 hingga abad ke-19.

Daerah perbatasan Mancanegari disebut Pinggir Reksa. Orang-orang Jawa yang berasal dari Jawa Tengah sadar akan perbedaan yang terdapat dalam sub-kebudayaan Surabaya dan logat Surabaya yang tersebar di daerah Delta Brantas dan daerah di sebelah selatannya, yang meliputi Malang dan daerah sekitarnya. Daerah yang lebih jauh ke timur lagi malahan tidak dikenal lagi oleh orang Jawa Tengah.

Orang Jawa yang tinggal di luar Pulau Jawa dapat juga dianggap sebagai suatu sub-variasi dari kebudayaan Jawa yang berbeda, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa orang Jawa yang dipindahkan ke Sumatra Selatan atau yang bermigrasi ke perkebunan-perkebunan tembakau di Sumatra Utara, misalnya, tetap mempertahankan kebudayaan asli mereka, dan karena itu tetap memperlihatkan sifat-sifat dari logat dan adat-istiadat daerah asalnya. Orang Jawa yang merantau ke Semenanjung Malaya atau yang dipekerjakan sebagai budak atau pekerjaan perkebunan di Afrika Selatan, Srilangka, Surinam, Curagao, dan Kale-

donia Barat, tentu mengembangkan variasi-variasinya sendiri dari kebudayaan Jawa.

3. Sifat Dasar Kebudayaan Jawa

Mengacu pada salah satu dari sebanyak 129 definisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Clyde, M. Kluckhohn dan William H. Kelly, yaitu bahwa "*A culture is a historically derived system of explicit and implicit designs for living, which tends to be shared by all or specially designated member of a group*", maka dapatlah dirumuskan bahwa kebudayaan Jawa adalah suatu pola hidup baik eksplisit maupun implisit merupakan suatu sistem yang terbentuk oleh sejarah, yang cenderung untuk diikuti oleh seluruh atau sebagian tertentu masyarakat Jawa.

Demikian sebagai produk yang dibentuk oleh sejarah Jawa selama ribuan tahun, maka kebudayaan Jawa menampakkan sifat-sifat dasar atau ciri-ciri karakteristiknya yang dapat dilihat sampai sekarang ini. Dalam hal menurut Sujamto (1993 : 18-20) seluruh aspek kebudayaan Jawa terpancar dari sifat karakteristiknya adalah: (1) religius, (2) non doktrin/non dogmatis, (3) toleran, (4) akomodatif, dan (5) optimistik.

Selanjutnya interaksi dari kelima sifat dasar kebudayaan

Jawa tersebut memperlihatkan corak dan wataknya, di antaranya yaitu: (1) Percaya kepada Tuhan sebagai *sangkan aparaning dumadi* dan bersifat *tan kena kimaya ngapa*, (2) Pancasila idealistik dan percaya kepada hal-hal yang bersifat *adi kodrati* (super natural), (3) Percaya kepada takdir, bersikap pasrah, tetapi tidak fatalistik, (4) Lebih mengutamakan hakikat dari pada segi-segi ritual dan formal, (5) Mengutamakan cinta kasih sebagai landasan pokok hubungan antar manusia, (6) Bersifat *momot* dan non sektarian serta menghormati agama orang lain, (7) Bersifat konvergen (menyatu) dan menghormati setiap kebenaran dari manajemen sumbernya, (8) Tidak menganggap bahwa keyakinannya adalah yang paling benar.

Perlu diketahui bahwa mengingat luasnya cukup ataupun nuansa kebudayaan Jawa serta hakikatnya, kesemuanya ini hanya berupa kecenderungan umum sebagai pola sikap dan tingkah laku bagi sekelompok manusia, yaitu manusia Jawa.

4. Nilai-Budaya dan Lingkungan Tradisional Jawa sebagai Pendorong Pembangunan

Di dalam sistem nilai-budaya masyarakat orang Jawa ada sejumlah nilai-budaya yang dapat mendorong pembangunan.

Nilai-nilai budaya itu berupa konsep-konsep dalam bentuk istilah-istilah atau kata-kata bahasa daerah Jawa.

Pertama ialah nilai-budaya yang berorientasi vertikal ke arah atasan, tokoh pembesar dan senior (*mituhu*). Nilai-budaya seperti ini mempunyai aspek positif, yaitu seorang pemimpin dapat dengan mudah mengajak rakyatnya untuk berperan serta dalam implementasi program pembangunan dengan cara memberi contoh. Apabila pada saat sekarang ini para pemimpin dan pembesar yang bersedia hidup sederhana, suka berhemat, dan secara teguh berdisiplin mentaati hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku, niscaya rakyat di bawah kepemimpinan atau kekuasaannya dengan sendirinya mengikuti jejaknya, yaitu ketat berdisiplin mematuhi hukum dan peraturan yang umum berlaku dalam masyarakat.

Selain itu, penerapan nilai-budaya yang terorientasi vertikal ke arah atasan tersebut dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk jangka waktu yang lama, sangat bermanfaat baik untuk menggerakkan maupun mendisiplin rakyat, serta untuk memilih loyalitas mutlak dalam jiwa mereka terhadap pekerjaan negara.

Selanjutnya yang kedua ialah

nilai-budaya yang memuji sifat tahan penderitaan (*prihatin*). Nilai-budaya ini bersumber dari beberapa nilai-budaya serta konsep lain. Misalnya konsep yang beranggapan bahwa hidup itu sudah sejak dari mula harus diterima sebagai sesuatu hal yang pada hakikatnya penuh dengan penderitaan dan bukan sebagai pemberian ataupun karunia yang penuh dengan kenikmatan. Baik ketahanan maupun keuletan hidup menderita yang dialami berlangsung cukup lama, itu menunjukkan suatu kesanggupan untuk mengikuti proses gerak hidup masyarakat. Sifat mentalitas yang positif ini amat menguntungkan untuk penyelenggaraan program pembangunan.

Kemudian yang ketiga ialah nilai-budaya yang mewajibkan seseorang untuk senantiasa berusaha, meskipun hidup itu pada hakikatnya harus dialami sebagai suatu masa ujian yang sarat dengan penderitaan, dan penderitaan tersebut perlu diperbaiki (*ikhtiyar*). Hal ini berarti bahwa manusia selalu wajib berupaya dalam hidupnya. Sesungguhnya konsep atau nilai-budaya *ikhtiyar* ini sudah pujangga pada jaman dahulu. Kalau saja nilai-budaya itu digali kembali dan diajarkan kepada anak-anak ataupun generasi muda sekarang dan yang akan datang, kiranya dapat membantu dalam mengembang-

kan sifat-sifat sikap mental mandiri. Di antaranya akan dapat menimbulkan kemauan untuk berusaha atas kemampuan sendiri, serta akan menumbuhkan nilai-budaya yang berorientasi terhadap keinginan berprestasi dalam berkarya.

Ke empat adalah nilai-budaya yang bersifat positif untuk pelaksanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat orang Jawa yang beragama Islam-Jawa, yaitu toleran terhadap pendirian-pendirian lain (*tepa selira*). Sudah barang tentu dalam hal ini, sikap toleran dilakukan selama pendirian-pendirian lain tersebut tidak mengganggu sendi-sendi kehidupan sehari-hari. Sifat mental semacam ini sangat penting untuk disampaikan atau disebarluaskan kepada generasi muda termasuk anak-anak demi kebahagiaan mereka di masa mendatang, jika mereka kelak harus hidup dalam suatu masyarakat majemuk atau multi etnis seperti masyarakat bangsa Indonesia.

Akhirnya ke lima, yaitu nilai-nilai yang merupakan salah satu unsur dalam nilai gotong-royong, seperti *gugur gunung* dan *sambatan*. Adapun unsur-unsur dalam nilai gotong-royong itu sebenarnya merupakan sebuah tema berpikir, bahwa manusia hidup di dunia ini tidaklah sendirian, melainkan dikelilingi oleh

sistem sosial dari komunitas dan masyarakat di sekitarnya. Dalam keadaan hidup seperti itu, seseorang akan ikut berbaur dalam proses peredarannya. Demikian tema berpikir seperti ini akan membawa suatu perasaan aman yang amat dalam pada nuraninya.

Berdasarkan atas latar belakang pikiran tersebut, maka ada bayangan bahwa dalam keadaan bagaimanapun hidup seseorang, misalnya ditimpa musibah, bencana atau malapetaka, orang itu berkeyakinan pasti akan ada yang membantunya. Kecuali itu dengan nilai gotong-royong membuat orang tidak perlu takut hidup sendiri sebagai sebatang kara. Demikian pada hakikatnya nilai-nilai gotong-royong dapat mendorong timbulnya rasa solidaritas sosial dengan cara saling bantu membantu mengatasi segala kesulitan hidup yang dialami oleh warga masyarakat. Rasa solidaritas sosial itu akan membangkitkan semangat kerja sama atau kooperasi yang menjadi landasan pembangunan, khususnya di bidang sosial dan ekonomi.

Adapun beberapa ungkapan tradisional Jawa yang berkaitan dengan Pancasila sebagai landasan idiil pembangunan nasional di bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan diuraikan berturut-turut sebagai ber-

ikut ini.

1. *Aja ngaji pupung*

Makna ungkapan ini memberi peringatan agar orang tidak memanfaatkan situasi baik untuk kepentingan diri pribadi yang justru mengarah kepada tindakan negatif. Sampai saat ini ungkapan tersebut masih tetap hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat orang Jawa sebagai pendukungnya. Pada kenyataannya makna ungkapan ini dapat diterapkan kepada situasi sekarang ini, di mana banyak pejabat pemerintah maupun swasta telah berbuat memanfaatkan situasi. Selagi masih memegang kuasa mereka melakukan tindak korupsi, misalnya dengan cara memanipulasi dan menyelewengkan dana uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Demikian sesungguhnya ungkapan tradisional ini yang merupakan peringatan yang amat penting perlu dihayati oleh para pejabat negara maupun swasta. Begitu pula ia para generasi muda patut memahami peringatan tadi makna tersebut. Dengan pemahaman akan makna peringatan itu, maka perbuatan yang berupa penyalahgunaan kesempatan, wewenang dan lain sebagainya diharapkan akan berkurang. Di dalam pembangunan nasional, dibutuhkan manusia pelaksana yang bersih,

penuh dedikasi dan tidak mementingkan diri sendiri. Sementara itu, jika makna, ungkapan tradisional ini dikaitkan dengan sila dari Pancasila, terlihat jelas berkaitan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan ungkapan tradisional Jawa ini memberi petunjuk kepada siapa saja agar mengembangkan perbuatan yang luhur, tidak berbuat yang merugikan orang lain.

2. *Ambeng adil paramarta*

Makna ungkapan ini ialah berwatak adil bijaksana dan berbudi luhur. Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi bukan negara totaliter. Maka dari itu para pemimpin masyarakat tidak boleh bertindak absolut, main kuasa, tanpa mendengar suara dan aspirasi rakyatnya.

Lebih dari itu pemimpin rakyat harus berlaku ataupun bersifat adil dalam memerintah bangsanya, tidak mementingkan diri pribadi atau golongannya sendiri, melainkan harus membe-la semua golongan dalam masyarakat. Selain itu, para pemimpin bangsa harus berbuat bijaksana dalam bertindak, Maksudnya tidak boleh melaksanakan kehendak pribadi atau golongannya sendiri. Dalam hal ini mereka wajib mendengar serta memperhatikan apa yang

menjadi kehendak rakyat, sehingga dalam mengambil sesuatu keputusan tidak berat sebelah ataupun berpihak dan merugikan orang lain.

Makna ungkapan ini sebenarnya erat berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu (1) sila kemanusiaan yang adil dan beradab, (2) sila persatuan Indonesia, (3) sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam (perwakilan) permusyawaratan/perwakilan, dan (4) sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. *Ana sethithik didum sethithik, ana akeh didum akeh*

Ungkapan ini berarti ada sedikit dibagi sedikit, ada banyak dibagi banyak. Ini mengajarkan kepada seseorang agar dalam tata pergaulan ia tidak kikir dan serakah, tetapi harus bersifat adil terhadap sesamanya.

Pada masyarakat orang di Jawa Tengah ungkapan ini biasanya untuk mengingatkan seseorang yang disertai kekuasaan untuk membagi sesuatu secara adil, misalnya membagi warisan, uang atau rejeki tertentu. Dengan kalimat di atas diharapkan semua orang akan bersifat adil dan merata. Adapun kaitannya dengan Pancasila ialah pada sila kelima, terutama butir 2 dan 4 yang berbunyi "Bersikap adil dan menghormati hak-

hak orang lain”.

4. *Wong iku kudu bisa bobot seleha*

Ungkapan ini berasal dari masyarakat orang Kudus, yang berarti orang itu harus bisa mawas diri. Jadi makna ungkapan ini ialah agar dalam menerima dan menjalankan suatu tugas, harus mawas diri apakah mampu atau tidak untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, orang harus mengetahui kekuatan serta kelemahan diri sendiri. Pengenalan akan diri sendiri atau introspeksi diri itu diperlukan supaya dalam menjalankan suatu tugas kewajiban atau pekerjaan tidak menerima kesulitan ataupun kekecewaan. Sebelum seseorang memulai untuk melaksanakan tugas, ia sudah harus dapat mengukur kekuatan sendiri apakah kiranya mampu atau tidak menghadapi berbagai kesulitan yang ada dalam tugas tersebut. Jika memang tidak ada kekuatan untuk mengatasi kesulitan itu (tidak dimilikinya), maka orang harus jujur mau mengakui secara terus terang dan tidak malah meletakkannya. Dengan demikian tugas atau pekerjaan tersebut dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih mampu, sehingga pekerjaan itu tidak terbengkalai. Kalau orang tidak mau jujur, misalnya hanya untuk gengsi diri atau materi, se-

perti uang, orang mau menerima tugas atau suatu jabatan padahal ia tidak bisa menyelesaikan atau mengatasi persoalan yang melekat pada tugas jabatan itu berarti orang tersebut sudah mampu diri sendiri dan orang lain. Kegagalan-kegagalan penyelesaian tugas pekerjaan itu berarti tertundanya suatu hasil karya tadi, dan ini merupakan suatu pemborosan waktu, tenaga, dan pikiran.

Sebenarnya makna ungkapan ini mempunyai nilai etis yang cukup tinggi, yakni mendidik seseorang untuk berani mawas diri, kejujuran dan ketegasan sikap. Jika ungkapan ini diterapkan dalam dalam era pembangunan dewasa ini, maka banyak pejabat atau aparat pemerintah yang tidak mau jujur dalam tugasnya, disebabkan oleh ketidakmampuan bersikap tegas atau dasar kejujuran ini maka akhirnya pelaksanaan tugas atau jabatan tadi mengambang di antara arus komersialisme dan modernisme. Banyak proyek-proyek pemerintah yang terbengkalai karena salah arus disebabkan pejabat atasan tidak berani melaksanakan kontrol atau pengawasan kepada bawahannya karena dia sendiri tidak bersih dalam arti bertindaculas. Masih banyak perangkapan jabatan itu bukan didasarkan atas dedikasi atau kemam-

puan seseorang, melainkan justru atas dasar perhitungan politis atau material. Keadaan yang seperti ini sangat memprihatinkan (dalam) situasi negara sedang dalam pembangunan. Demikian para generasi muda sebagai generasi penerus pembangunan bangsa, harus dihindarkan dari polusi etis semacam ini sejak dini hari.

Dalam pada itu, hubungan antara ungkapan tradisional ini dengan Pancasila termaktub dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab karena mengajarkan kepada orang supaya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan.

5. *Ngisor galeng ndhuwur galeng*

Ungkapan tradisional ini berasal dari daerah Banyumas yang mengartikan bahwa semua manusia mempunyai persamaan derajat dan memiliki hak azasi. Maka dari itu sangat tidak beralasan jika orang bersikap merendahkan diri orang lain, merasa dirinya lebih tinggi, sehingga mudah meremehkan dan suka menghina kepada orang lain. Para orang tua Jawa senantiasa mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa orang hidup itu yang penting berbudi luhur. Dalam hubungan ini kehormatan seseorang tidaklah ditentukan oleh tinggi-rendahnya derajat

seseorang, tidak juga ditentukan oleh kaya-miskinnya seseorang, atau besar-kecilnya kekuasaan seseorang, tetapi ditentukan oleh budinya. Orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah, mempunyai kedudukan yang tinggi, memegang kekuasaan yang besar, tetapi jika budinya dinilai tidak baik oleh masyarakat, maka orang tersebut tidak akan disegani. Mereka hanya takut kepada materi atau kekuasaannya saja.

Demikian sikap merendahkan ataupun meremehkan terhadap orang lain adalah sikap yang sungguh tercela dan harus dihindari dalam pergaulan hidup serta perhubungan sosial sehari-hari. Hal ini disebabkan pada dasarnya semua manusia sama derajatnya dan masing-masing mempunyai hak azasi. Adapun orang yang memiliki watak seperti tersebut di atas, ia tidak akan membeda-bedakan manusia dan akan manusia dan akan selalu bertindak adil. Sekalipun dia mempunyai kedudukan tinggi namun tidak sombong, dan meskipun dia berkedudukan rendah tidak berjiwa rendah. Sikap mental yang baik dan moral yang baiklah yang dan keduanya menjadi syarat utama untuk mencapai semua tujuan dalam hidup baik di dunia maupun di akherat, sedangkan syarat-syarat material hanya bersi-

fat pelengkap saja.

Adapun ungkapan tradisional ini sangat berkaitan dengan salah satu sila dalam Pancasila, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena di dalamnya terkandung ajaran yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

5. Hambatan Budaya dalam Pembangunan

Pada kenyataannya hampir sebagian besar kegiatan pembangunan yang diprogramkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah dewasa ini mengalami banyak hambatan yang cukup kompleks. Hambatan-hambatan itu selain yang ditimbulkan oleh faktor-faktor sosial, seperti susunan masyarakat, faktor psikologis, berupa bakat untuk usaha-usaha yang bersifat ekonomi, juga disebabkan oleh faktor budaya.

Adapun hambatan yang berasal dari budaya tersebut, di antaranya adalah tindakan ataupun sikap tidak disiplin serta tidak bertanggungjawab dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan, ekonomi, dan politik. Sebagai contoh, di samping kebaikan-kebaikan dari nilai-budaya lama yang berorientasi ke arah atasan dalam hubungan manusia dengan sesamanya, terdapat juga kelemahan-kelemahan lain dari nilai-budaya tersebut. Kelemahan-kelemahan itu sangat

menghambat laju pembangunan ekonomi dan perkembangan demokrasi. Misalnya, dengan mengendornya pengawasan dari pimpinan ataupun tokoh atasan terhadap norma-norma yang berlaku, itu telah menimbulkan hilangnya rasa tanggung jawab dan menurunnya rasa disiplin. Keduanya sekarang tampak sebagai suatu gejala yang cukup meluas dalam kehidupan masyarakat orang Jawa dan masyarakat lainnya di Indonesia.

Adapun bermacam-macam peristiwa perilaku yang tidak terpuji, seperti korupsi di berbagai instansi pemerintah, penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, pembobolan uang kekayaan negara di Bank BNI dan Bank BRI, pemalsuan ijazah, serta sikap tidak bertanggung jawab dalam perjanjian-perjanjian keuangan dan transaksi-transaksi ekonomi lainnya, itu semua merupakan akibat dari sisi kelemahan nilai-budaya tersebut di atas.

Dalam pada itu, selain adanya kelemahan dari nilai-budaya tadi, semua tindakan ataupun sikap dan perilaku yang bersifat negatif itu, juga disebabkan oleh pengingkaran serta pelanggaran terhadap ungkapan-ungkapan tradisional yang menasihatkan larangan bagi pejabat pemerintah maupun swasta untuk tidak melakukan perbuatan yang ber-

bentuk penyalahgunaan kesempatan, wewenang dan lain sebagainya, sebagaimana yang tersebut di dalam ungkapan-ungkapan tradisional di muka.

Berdasarkan atas realitas budaya dalam kehidupan masyarakat itu, maka pemahaman dan pengalaman dalam perbuatan nyata yang konsisten dan konsekuen dari sistem budaya berupa nilai-nilai dan peribahasa sebagai warisan budaya Jawa pada masa lalu sangatlah penting artinya dalam mendorong dan mempercepat proses pembangunan nasional.

Simpulan dan Saran

Bertolak dari uraian tentang revitalisasi nilai-budaya dan ungkapan tradisional Jawa di muka, kiranya dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan yang diterapkan di Indonesia, itu sudah sesuai dengan ideologi, falsafah, serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia yang bersifat sosial dari pada individual. Semua ini diketahui dari tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu dimaksudkan untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan hidup seluruh rakyat di tanah air.

Sementara itu sifat budaya Jawa yang akomodatif dan toleren terhadap anasir-anasir pluralisme masyarakat dan kebudayaan di sini, secara jelas telah

menjadi dasar-dasar dari Pancasila. Hal ini memperkuat kedudukan dan peranan budaya Jawa yang sudah lama berkembang dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Bukti-bukti mengenai hal itu dapat ditunjukkan dari sejumlah nilai-budaya dan ungkapan tradisional masyarakat orang Jawa yang sangat positif dan sekaligus menjadi penuntun bahkan sebagai pendorong pembangunan dipelbagai bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Namun, di dalam realitasnya tidak sama nilai-budaya dan ungkapan tradisional tersebut diikuti maupun dipatuhi oleh sebagian warga masyarakat, sehingga peristiwa ini mengakibatkan terjadinya gangguan yang menghambat keberhasilan pembangunan, terutama dalam pembangunan ekonomi. Kejadian ini dapat diketahui dari sikap dan praktik-praktik perbuatan tidak sosial yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara.

Maka dari itu untuk mengatasi hambatan budaya dalam pembangunan dibutuhkan perubahan-perubahan ataupun pembaharuan-pembaharuan yang membentuk mentalitas pembangunan. Mentalitas semacam ini mewajibkan sebagai syarat suatu nilai-budaya yang menumbuhkan sikap berdisiplin murni serta berani bertanggung jawab, di

samping nilai-nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, sifat berhemat, hasrat bereksplorasi dan berinovasi serta pandangan hidup yang menilai tinggi prestasi dalam berkarya.

Demikian agar semua cara itu berhasil dilakukan (1) pemberian contoh dalam perbuatan nyata yang baik, teristimewa oleh para pemimpin, tokoh-tokoh atasan, petinggi ataupun pejabat negara dan swasta, (2) pemberian insentif atau perangsang-pe-rangsang yang sesuai, (3) melakukan persuasi dan memberi penerangan, dan (4) pembinaan dan pengasuhan suatu generasi baru untuk masa mendatang yang dimulai sejak kecil dalam lingkungan keluarga.

Selanjutnya, selain dilakukan perubahan-perubahan aspek-aspek budaya itu, juga diperlukan kebijaksanaan dalam pembangunan kelembagaan sosial yang berpijak kepada nilai-nilai budaya yang luhur, atas berbangsa dan bernegara, serta penerapan konsep-konsep modern. Perlu diketahui bahwa dalam pengembangan perangkat atau kelembagaan ini bukan saja menyangkut struktur tetapi juga proses, dan bukan saja prosedur, melainkan juga nilai sikap dan tindakan yang membudaya serta mengikuti kelompoknya. Begitu pula perlu ditumbuhkembangkan kondisi obyektif yang

mendorong pelembagaan nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan baik pada orang seorang maupun pada perangkat sosial. Akhirnya disediakan prasarana dan sarana sosial yang mendorong terwujudnya tujuan-tujuan tersebut di atas.

Semua cara-cara itu dilaksanakan dengan pendekatan yang bersifat mendidik, pengembangan paradigma dan partisipasi masyarakat secara demokratis.

Daftar Pustaka

- Kodiran. 1999. "Kebudayaan Jawa" dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta : Penerbit : Djambatan, hal. 329-352.
- Koentjaraningrat. 1969. Rintangan-Rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Jakarta : Bhratara.
- _____. 1994. Kebudayaan Jawa Jakarta: Balai Pustaka.
- Mubyarto. 2003. Ekonomi Pancasila, Renungan Satu Tahun Pustep UGM. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila.
- Reksodihardjo, S. dkk. 1985. Ungkapan Tradisional yang Berkaitan dengan Sila-Sila dalam Pancasila. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Salim, E. 1991. *Lingkungan Hidup dan Pembnagunan Jakarta* : Mutiara Sumber Widya.

Sujatmo. 1993. *Sekitar Pandangan Hidup Jawa*. Semarang: Efhar & Dahara Prize.

_____. 1993. *Revitalisasi Budaya Jawa Menyongsong Datangnya Zaman Baru*. Semarang: Dahara Prize